**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Literatur Review**

Literatur *review*atau penelitian terdahulu merupakan aspek penting di dalam sebuah penelitian yang berguna untuk membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti pada saat ini. Literatur *review* sendiri menyangkut beberapa hal yang di dalamnya digunakan sebagai bahan referensi bagi proses dalam suatu penelitian, di mana literatur yang digunakan dapat berbentuk jurnal, skripsi, tesis, serta sumber-sumber bacaan lainnya yang berhubungan serta berkaitan satu dengan yang lainnya dalam penelitian ini.

Literatur *review* dapat diartikan sebagai sebuah ringkasan dari apa yang diketahui oleh seseorang peneliti mengenai fenomena tertentu. Literatur *review* selalu berdasarkan pada sumber kedua (sekunder) yang dimana seorang peneliti dapat mengulas buku-buku utama, jurnal-jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang relevan pada bidang yang sedang diteliti.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa literatur review yang mana dapat membantu selama penulisan skripsi ini. Dalam hal ini literatur riview diperlukan sebagai pembanding dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan. Berikut beberapa literatur yang digunakan :

Pertama, penulis merujuk pada skripsi yang ditulis oleh Widya Luthfianti Pasha dari Universitas Pasundan dengan judul skripsi Peran ILO (*International Labour Organization*) Dalam Menangani Permasalahan Pekerja Anak Di Bangladesh. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa penyebab tingkat pekerja anak di Bangladesh yang tinggi dikarenakan oleh faktor kemiskinan, namun faktor geografis juga turut mendorong tingginya angka kemiskinan, hal ini disebabkan oleh kondisi lahan yang tidak subur kerap memperburuk kehidupan masyarakat karena menyulitkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kesulitan menjual hasil panen, sulitnya akses ke kota atau wilayah lain hingga keluarga yang dilanda kemiskinan tidak mampu menanggung biaya pendidikan yang menyebabkan para orang tua merasa enggan untuk menyekolahkan anaknya. Bagi keluarga miskin di Bangladesh, menyekolahkan anak berarti menambah beban pengeluaran karena mereka harus menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk kebutuhan sekolah sehingga banyak anak-anak yang berhenti atau bahkan sama sekali tiak mendapatkan pendidikan sama sekali.

Selanjutnya, penulis merujuk pada skripsi yang ditulis oleh Rizkita Khansa Adzhana dari Universitas Padjajaran dengan judul skripsi Peran International Labour Organization (ILO) Dalam Melindungi Pekerja Anak Di Thailand Melalui *International Programme On The Elimination Of Child Labour* (IPEC)(2006-2015). Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa di Thailand permasalahan pekerja anak telah berlangsung menahun dan kompleks karena melibatkan anak-anak migran sebagai korban serta adanya ketidakstabilan politik nasional yang fluktuatif setiap tahunnya sehingga keseluruhan penyelesaian tidak dapat secara cepat dilakukan, dan permasalahan pekerja anak di Thailand membentuk sebuah siklus dimana masyarakat dewasa yang dahulunya menjadi pekerja anak, kerap mengulang dengan mempekerjakan anak-anak mereka atau mempekerjakan anak-anak di perusahaan mereka. Melalui *International Programme On The Elimination Of Child Labour* (IPEC), upaya ILO sebagai instrumen di bidang kampanye dan advokasi merupakan hal yang dapat memberikan dampak berkelanjutan karena dapat meningkatkan kepedulian dari masyarakat umum yang dapat ikut berkontribusi melawan praktik pekerja anak. Adapun bentuk kampanye yang dilakukan ILO-IPEC adalah *World Day Againts Child Labour* (WDCL) yang dilaksanakan pada 12 Juni setiap tahunnya.

Kemudian literatur yang terakhir, penulis merujuk pada jurnal JOMRI FISIP Vol.5 No.1 April yang ditulis oleh Junpa Marpaung dari Universitas Riau dengan judul penelitian Peran ILO Dalam Melindungi Pekerja Anak Di Thailand 2010-2024. Dalam penelitian tersebut menjelskan bahwa pekerja anak (Child Labour) bisa diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak yang memiliki usia dibawah minimum. Adanya pekerja anak ini telah marak terjadi diberbagai negara, khususnya negara berkembang Thailand. Pekerja anak di Thailand dipaksa untuk menjadi buruh dengan upah yang rendah. Pekerja anak memberikan efek yang buruk terhadap kehidupan sosial. Pekerja anak di Thailand yang semakin meningkat dari kurun waktu terakhir ini memberikan perhatian yang serius dari pemerintah terhadap kasus ini dan Thailand memiliki cara sendiri untuk menghindari adanya peningkatan pekerja anak. Oleh karena itu, Thailand membuat suatu program yang bermanfaat untuk mengatasi pekerja anak. Peran ILO dalam melindungi pekerja anak di Thailand diantaranya yaitu melalui Program *Good Labour Practices* (GLP) dan program ILO-IPEC (2010-2014) di Thailand dalam menangani pekerja anak dan pekerja paksa serta menawarkan kondisi kerja dan kesempatan kerja yang layak kepada anak-anak dan pekerja migran dalam mengatasi pekerja anak. Terlebih lagi ILO memiliki target dalam mengurangi pekerja anak di Thailand dengan mengurangi pekerja anak dan pekerja paksa di industri perikanan dan makanan laut dengan menciptakan industri yang lebih kondusif dan layak agar anak tidak terlibat dan tidak membahayakan pekerja anak di Thailand.

1. **Kerangka Teoritis**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menggunakan kerangka pemikiran yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk membantu memahami dan menganalisa permasalahan dengan didukung oleh teori-teori dari pakar pakar dan para ahli Hubungan Internasional yang berkompeten dalam penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan hasil tidak jauh dari sifat ilmiah dan bisa dipertanggung jawabkan secara akademis.

Kerangka teoritis merupakan sumber dan landasan atau bahkan acuan untuk menganalisa masalah yang akan diteliti. Warisan keilmuan berupa konsep teori dan pernyataan para pakar atau otoritas tertentu yang memiliki wewenang serta pemahaman yang komperhensif terhadap permasalahan yang tengah dikaji sangat diperlukan sebagai bahan acuan dalam permasalahan yang tengah dikaji.

Hubungan antarnegara telah menjadi sebuah keharusan bagi suatu negara dalam mengembangkan dan mempertahankan stabilitas kehidupan di negara yang bersangkutan. hubungan internasional inilah yang kemudian mempengaruhi dinamika kehidupan dunia internasional dari segala aspek, karena hubungan internasional merupakan aktivitas yang dilakukan oleh negara-negara yang mencakup semua bidang kehidupan dunia internasional.

Pada umumnya studi Hubungan Internasional merupakan suatu pola hubungan interaksi antar aktor yang melintasi suatu batas negara. Hubungan internasional juga berkaitan dengan politik, sosial, ekonomi, budaya dan interaksi lainnya diantara *state actor*dan *non state actor.* Dari hal tersebut, maka kita dapat menemukan suatu pandangan baru bagi masyarakat internasional untuk menciptakan hubungan internasional dalam rangka memenuhi baik untuk mempengaruhi cara hidup dari bangsa itu sendiri maupun akan kebutuhan bersama.

Adapun definisi dari hubungan internasional itu sendiri dijelaskan oleh **K.J. Holsti**dalam bukunya Politik Internasional : *suatu kerangka analisis*, yang diterjemahkan oleh Wawan Djuanda, menggambarkan hubungan internasional sebagai berikut :

**“Hubungan internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara. Pengkajian hubungan internasional termasuk didalamnya pengkajian politik luar negeri atau politik internasional, meliputi segala kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, palang merah internasional, pariwisata transportasi, komunikasi, dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.”**

Sedangkan definisi hubungan internasional menurut Mochtar Mas’oed adalah “studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu”.

Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional. Dalam melakukan aktivitas hubungan internasional, suatu negara memerlukan wadah dalam melakukan suatu interaksi antar anggota masyarakat dunia. Interaksi itu meliputi semua aspek kehidupan politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, sosial dan budaya. Salah satu wadah interaksi bagi negara-negara yakni dengan bergabung dalam sebuah organisasi internasional. Keberadaan organisasi internasional sangat diperlukan melihat banyaknya kepentingan-kepentingan dari suatu negara.

**Teuku May Rudy**dalam *Administrasi dan Organisasi Internasional*mencoba mendefinisikan organisasi internasional sebagai berikut :

**“pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.”**

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dipahami bahwa Organisasi Internasional merupakan wujud dari kesepakatan internasional, wadah serta alat dalam mengkoordinir dan melaksanakan kerjasama antar negara.

**Clive Archer** dalam *International Organization* mendefinisikan organisasi internasional sebagai berikut : **Sebuah struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya.**

Tujuan utama didirikannya organisasi internasional adalah untuk mewujudkan kepentingan bersama diantara anggota-anggota yang mempunyai pandangan yang sama melalui jalan damai. Organisasi internaisonal dalam interaksi internasional akan selalu berhubungan dengan aktor pelaku Hubungan Internasional itu sendiri. Peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu negara. Bahkan saat ini organisasi internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung. Peran organisasi internasional dapat dibagi kedalam tiga kategori sebagaimana yang diungkapkan oleh **Teuku May Rudy**yaitu sebagai berikut :

Peran organisasi internasional adalah:

1) Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik (sesama anggota);

2) Sebagai sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan;

3) Lembaga yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (antara lain kegiatan sosial, kemanusiaan, bantuan pelestarian lingkungan hidup, peace keeping operation dan lain-lain).

Organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas dan strukturnya. Menurut **Clive Archer** dalam bukunya *International Organizations*, secara umum, fungsi organisasi internasional dapat dibagi ke dalam sembilan fungsi, yaitu:

1. Artikulasi dan agregasi

Organisasi juga menjalankan mekanisme pengalokasian nilai-nilai dan sumber daya yang dimiliki yang lebih banyak disandarkan pada perjanjian-perjanjian yang dihasilkan melalui perundingan oleh masing-masing negara anggota. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa organisasi internasional berfungsi sebagai instrumen bagi negara untuk menyampaikan kepentingannya sendiri.

1. Norma

Organisasi internasional telah memainkan peran dalam membangun nilai-nilai tertentu di dalam hubungan internasional. Misalnya dalam penetapan nilai-nilai atau prinsip-prinsip non-diskriminasi, keadilan atau kesejahteraan sosial, keamanan internasional dan lain sebagainya.

1. Rekrutmen

Organisasi internasional menunjang fungsi penting untuk menarik atau merekrut partisipan dalam sistem politik internasional.

1. Sosialisasi

Organisasi internasional dijadikan alat untuk menanamkan suatu nilai, norma, atau pola perilaku kepada negara anggota.

1. Pembuat peraturan

Sistem internasional tidak mempunyai badan formal yang bertugas untuk membuat peraturan oleh karena itu, pembuatan keputusan internasional biasanya didasarkan pada praktek masa lalu, perjanjian bilateral antar negara, atau dari organisasi internasional.

1. Pelaksanaan peraturan

Pelaksanaan keputusan organisasi internasional diserahkan kembali kepada kedaulatan negara, tidak ada unsur pemaksaan bagi negara untuk menyetujui atau meratifikasi peraturan yang telah dibuat.

1. Pengawasan peraturan

Fungsi pengawasan biasanya dilaksanakan oleh lembaga kehakiman hukum, panel arbitrasi, pengadilan dan sebagainya. Tujuannya untuk memperjelas keberadaan hukum dan institusi pengadilan yang tidak dilibatkan dalam proses politik pembuatan keputusan dan biasanya baru dilibatkan ketika ada pihak-pihak yang bersengketa.

1. Informasi

Organisasi internasional melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi.

1. Operasional

Organisasi internasional menjalankan sejumlah fungsi operasional di banyak hal yang sama halnya seperti dalam pemerintahan. Hal ini dapat berupa dana, pelayanan teknis, perlindungan sosial, hingga layanan kesehatan.

Sedangkan berdasarkan tipe keanggotaannya Clive Archer mengklasifikasikan sebagai berikut :

1. Tipe keanggotaan
2. *Inter-Governmental Organization* atau IGO, yaitu organisasi internasional yang anggotanya merupakan wakil pemerintahan dari negara-negara di dunia. Contoh : PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).
3. *Non-Goverenmental Organization* atau NGO atau, INGO (*International Non-Governmental Organization*) merupakan organisasi internasional yang anggotanya bukan mewakili suatu pemerintahan/negara. Biasanya bergerak dibidang kebudayaan, keilmuwan, keagamaan, lingkungan hidup. Contoh : Greenpeace
4. Jangkauan Keanggotaan
5. Keanggotaan yang terbatas dalam wilayah tertentu
6. Keanggotaan yang mencakup seluruh negara-negara

Dalam hubungan internasional dikenal beberapa aktor selain negara yaitu organisasi internasional baik organisasi internasional antar pemerintah (IGO) maupun organisasi internasional non-pemerintah (NGO) yang merupakan suatu wadah kerjasama yang dapat membantu mencapai tujuan bangsa, termasuk usaha-usaha membangun kesejahteraan rakyat. IGO dapat diklasifikasikan atas empat kategori berdasarkan keanggotaanya dan tujuannya, yaitu :

1. Organisasi yang keanggotannya dan tujuannya bersifat umum, ruang lingkupnya global dan melakukan berbagai fungsi, seperti keamanan, kerjasama sosial-ekonomi, perlindungan hak-hak asasi manusia, dan pembangunan serta pertukaran kebudayaan. Contohnya : PBB.
2. Organisasi yang keanggotannya umum dan tujuannya terbatas, organisasi ini dikenal sebagai organisasi fungsional yang spesifik. Contohnya : ILO, WHO, UNICEF, UNESCO.
3. Organisasi yang keanggotaannya terbatas dan tujuannya umum, organisasi ini merupakan organisasi regional yang fungsi dan tanggung jawab keamanan, politik, sosial, dan ekonomi berskala luas.

Contohnya : Liga Arab, MEE.

1. Organisasi yang keanggotaannya dan tujuannya juga terbatas, organisasi ini terbagi atas organisasi sosial, ekonomi, dan militer.

Contohnya : NATO, NAFTA.

Dari pemaparan klasifikasi organisasi berdasarkan keanggotaan tersebut dapat disimpulkan bahwa ILO termasuk kedalam *Inter-Governmental Organization* (IGO), karena merupakan organisasi internasional dibawah naungan PBB serta beranggotakan wakil pemerintahan suatu negara. Selain itu dalam jangkauan keanggotannya ILO memiliki anggota yang mencakup seluruh wilayah di dunia tanpa terbatas pada suatu wilayah tertentu. ILO sendiri merupakan organisasi perburuhan internasional yang memiliki tujuan utama yaitu untuk mempromosikan hak-hak pekerja ditempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja.

Lebih lanjut lagi penulis menggunakan teori peranan, peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat. Pengertian peranan diungkapkan oleh **Soerjono Soekanto**, peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka berarti ia menjalankan suatu peranan.

Sedangkan **Mochtar Mas’oed** menyampaikan definisi “peranan (*role*), yaitu perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Perilaku yang dilekatkan pada posisi tersebut, diharapkan berperilaku sesuai dengan posisi tersebut”.

ILO (*International Labour Organization*) merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan pada tahun 1919. ILO merupakan bagian dari perjanjian Versailles yang mengakhiri perang dunia I. Sebagai bagian dari PBB dalam menangani masalah perburuhan, baik itu masalah domestik maupun masalah internasional. Kantor pusat ILO berkedudukan di Jenewa, Swiss. ILO didirikan atas dasar kepercayaan bahwa kedamaian yang universal dan abadi dapat diwujudkan jika berdasarkan keadilan sosial. ILO mendorong upaya terciptanya penyamarataan hak-hak bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh peluang kerja yang layak serta mengatasi permasalahan-permasalahan terkait dunia kerja. Organisasi ini juga melakukan kerjasama dengan wakil pekerja, pengusaha dan pemerintah untuk memecahkan masalah bersama yang terkait dengan ketenagakerjaan. Dan juga bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan-kebijakan dan program-program serta mengawasi standar-standar ketenagakerjaan internasional yang bekerjasama dengan 187 negara anggotanya.

ILO mempunyai sasaran tujuannya, sebagai berikut :

1. Mempromosikan dan mewujudkan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja;
2. Menciptakan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pekerjaan yang layak;
3. Meningkatkan cakupan dan keefektifan perlindungan sosial untuk semua;
4. Memperkuat tripartisme dan dialog sosial.

Sasaran tujuan diatas kemudian diwujudkan dengan cara:

1. Memformulasikan dan menginformasikan berbagai kebijakan dan program internasional untuk mempromosikan hak-hak asasi manusia, meningkatkan kondisi kerja dan memperluas kesempatan kerja;
2. Menciptakan standar internasional ketenagakerjaan didukung dengan sistem unik untuk mengawasi pelaksanaan mereka yang berfungsi sebagai petunjuk kewenangan internasional dalam melaksanakan kebijakan ke dalam pelaksanaannya.

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi dalam hubungan internasional yang paling sering dilakukan. Kerjasama dilakukan ketika ada dua pihak atau lebih yang menghadapi suatu isu yang menjadi masalah bersama dan pihak-pihak tersebut memiliki kepentingan tersendiri atau bersama berkaitan dengan isu tersebut. Hal ini sejalan dengan definisi kerjasama yang dikemukakan oleh Heywood (Andrew Heywood. 2002. Political Ideologis: An Introduction. Palgrave Macmillan.Hal 4) yaitu kegiatan yang dilakukan bersama untuk mencapai tujuan bersama melalui tindakan bersama.

 Kerjasama internasional adalah bentuk interaksi yang dilakukan antara negara-negara ataupun melibatkan aktor non-negara yang menyadari kesalingtergantungan yang mengelilingi mereka. Kerjasama internasional adalah alat bagi aktor-aktor hubungan internasional yang fungsinya memfasilitasi dan melayani berbagai macam kegiatan yang tak ada batasnya. Kerjasama ini meliputi berbagai macam bidang seperti politik, keamanan, ekonomi, budaya dan sebagainya. Holsti memberikan beberapa alasan mengapa negara-negara melakukan kerjasama internasional (kalevi J.Holsti.1995.International Politics: A Framework for Analysis. New Jersey: Prentice Hall Innternasional.Hal 362)

* Untuk menigkatkan kesejahteraan ekonomi, melalui kerjasama negara-negara dapat memotong ongkos produksi untuk memenuhi kebutuhan mereka dan rakyatnya meskipun negara-negara tersebut mengalami keterbatasan baik dalam segi sumber daya alam maupun manusia.
* Untuk meningkatkan efisiensi, seperti pengurangan biaya dan ongkos.
* Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.
* Untuk mengurangi atau menghilangkan *image* negatif yang selama ini menjadi alasan bagi negara lain memandang negara tersebut

Kerjasama bisa timbul dari suatu komitmen terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha untuk memenuhi kepentingannya. Kunci dari perilaku kerjasama adalah pada sejauh mana setiap pihak yang bekerja sama percaya bahwa yang lainnya akan mematuhi kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam kerjasama. isu utama dari konsep kerjasama adalah pemenuhan kebutuhan pribadi, dimana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak akan diperoleh melalui kerjasama dari pada berusaha memenuhi kepentingannya dengan berusaha sendiri (james E Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff. 1997. Contending Theories of international Relations: A Comprehensive Survey. Longman. Hal 418-419).

Adapun motif kerjasama internasional, dibedakan menjadi tiga, yakni : (Peter.A, Toma dan Robert.F.Gorman.1991.International Relations: Understanding Global Issue. California: Brooks/Cole Publishing Company. Hal 384)

* Meningkatkan kepentingan nasional
* Memelihara perdamaianmeningkatkan kesejahteraan ekonomi

Kerjasama internasional merupakan sebuah interaksi yang kompleks baik itu ditinjau dari para aktor yang terlibat maupun aspek-aspek yang membidanginya. Sebuah kerjasama internasional dapat berupa kerjasama dalam bisang apapun, seperti yang disampaikan oleh Yani dan Perwita bahwa kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan.

Pekerja anak meliputi semua anak yang bekerja dibawah usia minimum sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nasional setiap negara dan segala bentuk terburuk dari pekerjaan yang dilakukan anak-anak. Jenis pekerjaan terburuk berupa pekerjaan yang oleh karena kondisi-kondisi yang menyertai atau melekat pada pekerjaan tersebut ketika dilakukan akan membahayakan anak, melukai anak (secara jasmani, emosi dan atau seksual), mengeksploitasi anak, atau membuat anak tidak mengenyam pendidikan (Organisasi Perburuhan Internasional, 2009).

Yang dimaksud dengan pekerja anak adalah segala bentuk pekerjaan tidak wajar yang dilakukan oleh anak-anak, yakni bertujuan untuk menghasilkan uang dan menghidupi keluarga. Pekerja anak tidak meliputi pekerjaan ringan di sekitar rumah yang dilakukan sepulang sekolah atau pekerjaan yang dapat mengasah keterampilan, melainkan pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab dan tenaga berlebihan yang dilakukan setiap hari, terdapat unsur eksploitasi, mengganggu masa pendidikan, dan dapat merusak moral anak pada usia tersebut.

ILO mengkategorikan bahwa pekerja anak adalah anak-anak yang berada dalam (Progresia,2000):

* Anak-anak yang bekerja telah dirampas hak-haknya secara pribadi.
* Anak-anak yang bekerja di bawah tekanan yang sangat kuat, walaupun diberikan upah.
* Anak-anak yang bekerja pada pekerjaan yang berbahaya, baik bagi keselamatan jiwa maupun fisik.
* Anak-anak yang bekerja pada usia yang relatif muda, yaitu di bawah 12 tahun.

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak Pasal 1, menyatakan bahwa pekerja anak adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang, ayat selanjutnya menyatakan bahwa Penanggulangan Pekerja Anak atau disebut PPA adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya.

Pekerja anak adalah masalah sosial yang telah menjadi isu dan agenda global bangsa-bangsa di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Data organisasi Buruh Internasional (ILO) menunjukan, jumlah pekerja anak di dunia mencapai sekitar 200 juta jiwa. Dari jumlah itu, 75 persen berada di Afrika, 7 persen di Amerika Latin, dan 18 persen di Asia.

Di Indonesia, diperkirakan terdapat 2,4 juta pekerja anak. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka lebih besar, yaitu 2,5 juta jiwa. Angka yang tercatat tersebut baru data anak jalanan, belum termasuk anak-anak yang terjun di sektor industri.

Menurut BPS, usia yang dapat dikategorikan pekerja anak adalah mereka yang berumur 10-14 tahun. Jika kategori yang dipakai lebih luas sesuai dengan instrumen internasional tentang anak, yaitu usia 0-18 tahun, jumlah pekerja anak akan jauh kebih besar. Pekerja anak diyakini akan terus bertambah menyusul krisis ekonomi yang tidak kunjung usai sejak tahun 1997. Kecenderungan meningkatnya jumlah pekerja anak dapat dilihat dari meningkatnya anak jalanan setiap tahunnya. Dalam banyak kasus, anak-anak yang masuk ke pasar kerja merupakan rasionalisasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang dilanda kemiskinan.

1. **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka pemikiran dan perumusan masalah serta asumsi-asumsi diatas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

**“Dengan adanya Implementasi program simulasi Pendidikan, maka permasalahan eksploitasi pekerja anak di Indonesia dapat diminimalisir yang ditandai dengan berkurangnya eksploitasi pekerja anak di Indonesia”**

1. **Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis****(Teoritik)** | **Indikator****(Empirik)** | **Verifikasi****(Analisis)** |
| Variabel Bebas:Program ILO melalui proyek EAST (*Education and Skill Training*) | 1. Adanya program ILO dalam mengurangi pekerja anak di Indonesia:

Melalui Proyek *Education and Skills Training* (EAST), yaitu program Simulasi Pendidikan | * Melalui Proyek EAST, ILO telah mendorong pembentukan dan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah lokal di beberapa daerah. Selain itu, terkait permasalahan anak-anak yang dropout, melalu Proyek ILO-EAST telah mendorong dan memotivasi banyak anak untuk kembali ke sekolah formal dan melanjutkan pendidikannya sampai tuntas. Hal tersebut dilakukan dengan kerjasama khususnya dengan PKBM, tokoh masyarakat, serta terjun langsung berdiskusi dengan pihak orangtua akan pentingnya pendidikan bagi anak serta bahaya pekerja anak. ([http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/publi c/---asia/---ro-bangkok/---ilojakarta/documents/publication/wcms\_1 25730.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/publi%20c/---asia/---ro-bangkok/---ilojakarta/documents/publication/wcms_1%2025730.pdf))
 |
| Variabel Terikat :eksploitasi pekerja anak di Indonesia | 1. Mempekerjakan anak-anak di bawah umur
 | * Terdapat 3,27 juta anak yang bekerja atau sebesar 8,80% dari keseluruhan anak usia 10-17 tahun. Rata-rata jam kerja anak adalah 42 jam per minggu. Dari keseluruhan anak yang bekerja tersebut, terdapat 41,80% anak yang tereksploitasi berdasarkan jam kerja. Rata-rata upah/gaji/pendapatan yang diterima anak sangatlah rendah, yaitu Rp171.190 per bulan. Dari keseluruhan anak yang bekerja, terdapat 20,88% anak yang tereksploitasi dari segi upah. Sebesar 52,31% anak yang tereksploitasi dari segi upah tinggal di daerah perdesaan, sedangkan 47,69% tinggal di daerah perkotaan. (SAKERNAS, 2011)
 |

**E. Skema Kerangka Teoritis**

